

Evaluasi Administrasi Pembangunan Desa Pesisir Bengkalis Tahun 2024 Melalui Idm dan SDGS Desa

Yunika Nuuru Afriza^{1*}, Taryono², Mutiara Lasnita Siahaan³

^{1,2,3}Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Riau, Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5, Pekanbaru, Provinsi Riau
E-mail: yunikanuuru1057@student.unri.ac.id

* Corresponding Author

<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3657>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 31 Oct 2025

Revised: 06 Nov 2025

Accepted: 17 Nov 2025

Kata Kunci:

Administrasi
Pembangunan, Desa
Pesisir, IDM, SDGs,
Bengkalis

Keywords:

Development
Administration, Coastal
Villages, IDM, SDGs,
Bengkalis

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pembangunan desa pesisir di Kabupaten Bengkalis tahun 2024 dengan menggunakan dua instrumen utama, yaitu Indeks Desa Membangun (IDM) dan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kuantitatif dengan analisis kebijakan kualitatif. Data diperoleh dari publikasi resmi Kementerian Desa PDTT, BPS Kabupaten Bengkalis, serta dokumen RPJMD Bengkalis 2021–2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas desa pesisir berada pada kategori Mandiri (55%) dan Maju (27%), sedangkan 18% lainnya masih berstatus Berkembang dan Tertinggal. Analisis SDGs memperlihatkan capaian tertinggi pada dimensi sosial (85%), diikuti ekonomi (78%), dan lingkungan (72%). Hal ini menegaskan bahwa pembangunan desa pesisir Bengkalis relatif berhasil dalam aspek sosial dan ekonomi, tetapi masih menghadapi tantangan signifikan dalam aspek lingkungan, khususnya abrasi pantai, degradasi ekosistem mangrove, dan pengelolaan sampah pesisir. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan administrasi pembangunan desa belum sepenuhnya tercermin dalam dimensi lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola pemerintahan desa melalui peningkatan kapasitas aparatur, integrasi kebijakan RPJMD, serta partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan desa pesisir yang inklusif dan berkelanjutan.

This study aims to evaluate coastal village development in Bengkalis Regency in 2024 using two main instruments: the Village Development Index (IDM) and the Village Sustainable Development Goals (SDGs). The research employed a descriptive-quantitative approach supported by qualitative policy analysis. Data were collected from the official publications of the Ministry of Villages (Kemendesa PDTT), the Bengkalis Regency Statistics Agency (BPS), and the Bengkalis Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) 2021–2026. The findings reveal that most coastal villages are categorized as Independent (55%) and Advanced (27%), while 18% remain in Developing and Underdeveloped categories. The SDGs assessment shows the highest achievement in the social dimension (85%), followed by the economic (78%) and environmental (72%) dimensions. These results indicate that coastal village development in Bengkalis has been relatively successful in social and economic aspects but still faces major challenges in the environmental sector, particularly coastal abrasion, mangrove degradation, and waste management. The study highlights that strong IDM performance does not fully guarantee success in environmental sustainability. Therefore, strengthening governance through capacity building of village apparatus, policy integration with RPJMD, and enhancing community participation is essential to achieve inclusive and sustainable coastal village development.



This is an open access article under the CC–BY–SA license.

How to Cite: Yunika Nuuru Afriza, et al (2025). Evaluasi Administrasi Pembangunan Desa Pesisir Bengkalis Tahun 2024 Melalui Idm dan SDGS Desa, 4(2) 10065-10070. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3657>

PENDAHULUAN

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu wilayah pesisir strategis di Provinsi Riau dengan posisi penting baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial. Sebagai daerah kepulauan dengan garis pantai sepanjang ±500 km, Bengkalis memiliki potensi besar dalam sektor perikanan, pariwisata bahari, dan sumber daya alam pesisir. Namun, potensi tersebut beriringan dengan tantangan pembangunan, seperti abrasi pantai, alih fungsi lahan, degradasi mangrove, serta keterbatasan infrastruktur desa. Kondisi ini menuntut peran pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan desa pesisir yang adaptif dan berkelanjutan (Bappeda Bengkalis, 2021)

Dalam konteks administrasi publik, pembangunan desa pesisir harus didasarkan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang mencakup akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Administrasi publik mengacu pada proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya publik untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien (Rosenbloom et al., 2015). Penerapan administrasi publik dalam pembangunan desa menekankan pengelolaan sumber daya alam dan sosial secara terintegrasi serta penguatan kelembagaan desa untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat (Nurfajar Kapriaji, 2022)

Pengukuran kemajuan pembangunan desa menjadi penting dalam kerangka administrasi pembangunan. Dua instrumen utama yang digunakan adalah Indeks Desa Membangun (IDM) dan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. IDM menilai status desa berdasarkan dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi (Kemendesa PDTT, 2024). Sementara itu, SDGs Desa berfungsi sebagai kerangka pembangunan berbasis 18 tujuan global yang disesuaikan dengan konteks desa, termasuk pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik, dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan (Kementerian Desa, 2021)

Kajian sebelumnya lebih banyak menekankan pembangunan infrastruktur atau ekonomi makro di Bengkalis (Daffa, 2023; Yolanda, 2022). Namun, kajian yang mengaitkan status IDM dan capaian SDGs Desa dengan administrasi pembangunan desa pesisir masih sangat terbatas. Padahal, wilayah pesisir memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang khas: ketergantungan masyarakat pada perikanan tangkap, kerentanan terhadap abrasi, serta keterbatasan akses pelayanan dasar. Kesenjangan penelitian ini menunjukkan perlunya evaluasi pembangunan desa pesisir melalui pendekatan administrasi pembangunan.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai efektivitas pembangunan desa pesisir dengan menggunakan IDM dan SDGs Desa sebagai instrumen evaluasi. Analisis ini diharapkan dapat menjawab sejauh mana kebijakan pembangunan desa telah terimplementasi secara optimal, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penguatan tata kelola pembangunan desa pesisir. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran empiris mengenai status pembangunan desa, tetapi juga menyajikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas administrasi pembangunan desa pesisir.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis status IDM desa pesisir di Kabupaten Bengkalis tahun 2024; (2) menilai capaian indikator SDGs Desa, khususnya dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan; serta (3) mengidentifikasi tantangan dan peluang administrasi pembangunan desa pesisir dalam kerangka kebijakan pembangunan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif dengan dukungan analisis kualitatif kebijakan. Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, yang memiliki karakteristik sebagai wilayah pesisir dengan jumlah desa pesisir yang cukup signifikan. Unit analisis penelitian adalah desa pesisir yang tercatat dalam data resmi Indeks Desa Membangun (IDM) dan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa tahun 2024.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari:

1. Publikasi resmi Kementerian Desa PDTT mengenai IDM dan SDGs Desa 2024.
2. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bengkalis, termasuk Kabupaten Bengkalis dalam Angka 2024.
3. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis 2021–2026.

Laporan resmi Bappeda dan Dinas terkait mengenai pembangunan desa pesisir.

Populasi penelitian ini adalah seluruh desa di Kabupaten Bengkalis yang berstatus desa pesisir. Total desa pesisir yang menjadi unit analisis adalah 100 desa, terdiri dari desa dengan status IDM Mandiri, Maju, Berkembang, dan Tertinggal. Karena penelitian bersifat sensus data sekunder, maka seluruh desa pesisir dijadikan sampel penelitian.

Variabel utama dalam penelitian ini meliputi:

1. Indeks Desa Membangun (IDM) → status desa (Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal).
2. Skor SDGs Desa → meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan.
3. Indikator administrasi pembangunan → prioritas kebijakan dari RPJMD Bengkalis (pemberdayaan masyarakat, infrastruktur desa, konservasi lingkungan, pengembangan perikanan, pengurangan kemiskinan).

Data dikumpulkan dengan cara dokumentasi, yaitu menelaah publikasi resmi pemerintah (BPS, Kemendesa, RPJMD, Bappeda). Selain itu, digunakan pula literatur akademik berupa jurnal, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan untuk memperkuat analisis.

Data dianalisis menggunakan:

1. Analisis Deskriptif Statistik → untuk menggambarkan distribusi desa berdasarkan status IDM dan rata-rata skor SDGs Desa.

$$Persentase_i = \frac{n_i}{N} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan: *Persentase i* = adalah proporsi desa dalam kategori ke-*i*, *n_i* jumlah desa kategori ke-*i*, dan *N* jumlah desa keseluruhan.

2. Analisis Keterkaitan IDM–SDGs → dilakukan dengan membandingkan distribusi status desa (Mandiri–Tertinggal) dengan skor SDGs pada dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan.
3. Analisis Kebijakan (Content Analysis) → menelaah kesesuaian capaian IDM dan SDGs Desa dengan arah kebijakan pembangunan desa pesisir dalam RPJMD 2021–2026.
4. Interpretasi Administrasi Pembangunan → hasil analisis kuantitatif didiskusikan dalam kerangka administrasi publik, terutama konsep good governance, partisipasi masyarakat, dan efektivitas kelembagaan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Pembangunan Desa pesisir Berdasarkan IDM

Hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024 menunjukkan distribusi desa pesisir Kabupaten Bengkalis dalam empat kategori: Mandiri, Maju, Berkembang, dan Tertinggal (Tabel 1).

Table 1. Distribusi Desa Pesisir Kabupaten Bengkalis berdasarkan Status IDM Tahun 2024

Status IDM	Jumlah Desa	Persentase (%)
Mandiri	55	55,0
Maju	27	27,0
Berkembang	15	15,0
Tertinggal	3	3,0
Total	100	100

Sumber : Diolah dari data IDM & SDGs Desa Kemendesa PD TT, 2024

Mayoritas desa pesisir di Bengkalis telah mencapai kategori Mandiri dan Maju (82%), mencerminkan keberhasilan program pembangunan desa, khususnya dalam aspek sosial dan ekonomi. Namun, masih terdapat 18% desa yang berstatus Berkembang dan Tertinggal. Desa dengan status ini umumnya menghadapi keterbatasan akses infrastruktur dasar, kerentanan terhadap abrasi pantai, serta ketergantungan tinggi pada sektor perikanan tradisional.

Capaian Pembangunan Desa Berdasarkan SDGs

Evaluasi berdasarkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa tahun 2024 menunjukkan perbedaan capaian antar dimensi (Tabel 2).

Table 2. Skor Rata-rata SDGs Desa Pesisir Kabupaten Bengkalis Tahun 2024

Dimensi	Rata-rata Skor (%)
Sosial	85
Ekonomi	78
Lingkungan	72

Sumber: Diolah dari data IDM & SDGs Desa, Kemendesa PDTT, 2024

Hasil ini menunjukkan bahwa dimensi sosial memperoleh skor tertinggi (85%), yang berarti akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik relatif baik. Dimensi ekonomi berada pada tingkat cukup baik (78%), ditopang oleh perikanan tangkap dan perdagangan lokal. Namun, dimensi lingkungan memiliki skor paling rendah (72%), yang mencerminkan masih adanya permasalahan abrasi pantai, degradasi mangrove, dan keterbatasan pengelolaan sampah pesisir.

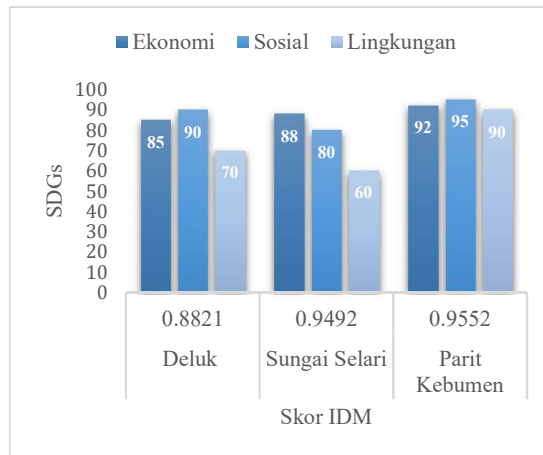
Tabel 3 menunjukkan perbandingan status IDM dan capaian indikator SDGs Desa (dalam skala 0 – 100) pada beberapa desa pesisir terpilih. Misalnya, Deluk dan Parit Kebumen sama-sama berstatus Mandiri dengan skor tinggi pada indikator ekonomi dan sosial, sedangkan Sungai Selari memiliki capaian dimensi lingkungan yang lebih rendah. Data dalam tabel ini disusun berdasarkan laporan resmi dan studi lapangan terkait

Table 3. Perbandingan status IDM dan capaian SDGs Desa (nilai 0–100) di beberapa desa pesisir Bengkalis.

Desa (Kecamatan)	Skor IDM	Status	Ekonomi (SDGs)	Sosial (SDGs)	Lingkungan (SDGs)
Deluk (Bantan)	0,8821	Mandiri	Tinggi	Tinggi	Sedang
Sungai Selari (Bukit Batu)	0,9492	Mandiri	Tinggi	Cukup	Rendah
Parit Kebumen (Rupat)	0,9552	Mandiri	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber: Nilai IDM berdasarkan data Kemendesa PDTT, 2024

Analisis lebih lanjut memperlihatkan hubungan antara skor Indeks Desa Membangun (IDM) dan capaian SDGs Desa pada dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan di beberapa desa pesisir. Gambar 1 menunjukkan perbandingan tiga desa: Deluk, Sungai Selari, dan Parit Kebumen, yang semuanya memiliki skor IDM tinggi ($\geq 0,88$), tetapi capaian SDGs antar dimensi berbeda.



Gambar 1. Keterkaitan Skor IDM dengan Capaian SDGs Desa di Tiga Desa Pesisir Bengkalis (2024)

Sumber: Diolah dari data IDM & SDGs Desa, Kemendesa PDTT, 2024

Hasil analisis mengindikasikan bahwa desa dengan skor IDM relatif tinggi tidak selalu memiliki capaian SDGs yang seimbang. Desa Parit Kebumen dengan skor IDM 0,9552 menunjukkan capaian ekonomi, sosial, dan lingkungan yang relatif merata dan tinggi, sehingga dapat dikatakan memiliki pembangunan desa yang lebih holistik. Sebaliknya, desa Deluk (0,8821) dan Sungai Selari (0,9492)

memperlihatkan ketimpangan: skor sosial dan ekonomi relatif tinggi, tetapi capaian lingkungan masih rendah (<70%).

Temuan ini menegaskan bahwa indikator IDM yang kuat belum sepenuhnya menjamin keberhasilan pada dimensi lingkungan. Dalam kerangka administrasi pembangunan, kondisi ini mengindikasikan masih lemahnya integrasi kebijakan lingkungan dalam pembangunan desa pesisir. Dengan demikian, meskipun tata kelola pembangunan berhasil meningkatkan layanan sosial dan perekonomian, isu ekologis seperti abrasi, degradasi mangrove, dan pengelolaan sampah pesisir tetap menjadi hambatan utama.

Keterkaitan dengan RPJMD dan Administrasi Pembangunan

Hasil analisis keterkaitan antara IDM dan SDGs Desa di wilayah pesisir Bengkulu menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar desa telah mencapai status Mandiri dan Maju, terdapat ketimpangan antar-dimensi pembangunan. Skor sosial relatif tinggi (85%), ekonomi cukup baik (78%), sementara dimensi lingkungan tertinggal (72%). Kondisi ini relevan dengan isu-isu strategis yang diidentifikasi dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu 2021–2026, yakni kerentanan pesisir terhadap abrasi, keterbatasan infrastruktur dasar, serta degradasi ekosistem mangrove.

Dari perspektif administrasi pembangunan, hal ini mencerminkan perlunya tata kelola desa yang lebih terintegrasi dengan kebijakan daerah. Pemerintah Kabupaten Bengkulu telah menetapkan lima prioritas utama dalam RPJMD: (1) pemberdayaan masyarakat desa, (2) peningkatan infrastruktur dasar, (3) konservasi lingkungan pesisir, (4) penguatan sektor perikanan, dan (5) pengurangan kemiskinan. Namun, capaian SDGs menunjukkan bahwa prioritas ketiga—konservasi lingkungan—belum berjalan seefektif dimensi lainnya.

Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuntut akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa (Denhardt, 2015). Dalam konteks Bengkulu, hasil penelitian ini mengindikasikan adanya kebutuhan memperkuat peran aparat desa dalam mengintegrasikan program SDGs dengan indikator IDM, khususnya pada dimensi lingkungan. Misalnya, rehabilitasi mangrove, peningkatan sistem pengelolaan sampah, dan pengendalian abrasi pantai memerlukan koordinasi lintas sektor dan dukungan birokrasi yang responsif.

Dengan demikian, analisis menunjukkan bahwa meskipun pencapaian pembangunan desa pesisir di Bengkulu relatif baik pada aspek sosial dan ekonomi, terdapat gap kelembagaan dalam administrasi pembangunan yang perlu diperkuat. Rekomendasi strategis mencakup: (a) memperkuat koordinasi pemerintah desa–daerah dalam implementasi RPJMD, (b) meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam perencanaan berbasis data IDM dan SDGs, serta (c) memastikan partisipasi masyarakat dalam program konservasi lingkungan pesisir.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan desa pesisir di Kabupaten Bengkulu tahun 2024 telah mengalami kemajuan signifikan berdasarkan capaian Indeks Desa Membangun (IDM) dan SDGs Desa. Dari total desa pesisir, sebagian besar telah berada pada kategori Mandiri (55 desa) dan Maju (27 desa), dengan hanya sebagian kecil yang masih Berkembang (15 desa) atau Tertinggal (3 desa). Kondisi ini mengindikasikan adanya kemajuan nyata dalam dimensi sosial, ekonomi, dan tata kelola desa.

Capaian SDGs Desa memperlihatkan bahwa dimensi sosial berada pada tingkat tertinggi (85%), diikuti dimensi ekonomi (78%), sementara dimensi lingkungan masih tertinggal (72%). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan desa pesisir di Bengkulu telah berhasil meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, namun aspek keberlanjutan lingkungan masih menjadi tantangan utama, khususnya terkait abrasi pantai, degradasi ekosistem pesisir, dan keterbatasan pengelolaan sumber daya alam.

Keterkaitan antara IDM dan SDGs Desa menegaskan bahwa desa dengan status lebih tinggi (Mandiri dan Maju) cenderung memiliki capaian sosial dan ekonomi lebih baik, tetapi capaian lingkungan belum sejalan sepenuhnya. Dengan demikian, prioritas pembangunan ke depan perlu diarahkan pada penguatan dimensi lingkungan melalui program konservasi pesisir, rehabilitasi mangrove, serta pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

Secara umum, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan desa pesisir Bengkulu telah berjalan positif, namun keseimbangan antara dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan harus terus

diperkuat agar tercapai pembangunan desa yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan sesuai dengan kerangka administrasi pembangunan dan tata kelola desa modern.

Berikut saran dari penelitian yang telah dilakukan: 1) Penguatan Dimensi Lingkungan: Pemerintah Kabupaten Bengkalis perlu memprioritaskan program konservasi pesisir, seperti rehabilitasi mangrove, pengendalian abrasi, dan pengelolaan sampah berbasis komunitas, untuk meningkatkan capaian SDGs Desa pada aspek lingkungan. 2) Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa: Aparat desa pesisir perlu mendapatkan pelatihan dalam tata kelola pembangunan desa berbasis data (IDM dan SDGs), manajemen sumber daya alam, serta perencanaan pembangunan yang responsif terhadap isu iklim dan ekologi. 3) Penguatan Kolaborasi dan Partisipasi Masyarakat: Partisipasi masyarakat pesisir harus lebih dioptimalkan melalui forum musyawarah desa, kelompok sadar lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi berbasis usaha perikanan dan wisata bahari. 4) Integrasi Program Pembangunan dengan RPJMD: Setiap intervensi pembangunan desa pesisir sebaiknya mengacu pada RPJMD 2021–2026 agar lebih sinkron dengan arah kebijakan daerah, terutama dalam pengurangan kemiskinan, peningkatan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. 5) Monitoring dan Evaluasi Berbasis Indikator: Perlu dilakukan pemantauan rutin terhadap perkembangan IDM dan capaian SDGs Desa untuk menilai efektivitas program, mengidentifikasi desa yang rentan, serta menyusun strategi pembangunan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Bappeda Bengkalis. (2021). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis 2021-2026. https://bappeda.bengkaliskab.go.id/web/tampilkan/324/32401653464RPJMD_2021-2026_KABUPATEN_BENGKALIS_FINAL.pdf
- Daffa, R. (2023). Dampak alih fungsi lahan terhadap ketahanan pangan di Provinsi Riau. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 12(2), 101–115.
- Denhardt, R. B. , & D. J. V. (2015). *The new public service: Serving, not steering*. Routledge. <https://www.routledge.com/Public-Administration-Understanding-Management-Politics-and-Law-in-the-Public-Sector/Rosenbloom-Kravchuk-Clerkin/p/book/9781032055558>
- Kemendesa PDTT. (2024). IDM Bengkalis.
- Kementerian Desa, P. D. T. dan Transmigrasi. (2021). SDGs Desa: Pencapaian pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. <https://www.sekarwangi.desa.id/desa/upload/dokumen/SOP-Pemutakhiran-Data-SDGs-Desa.pdf>
- Nurfajar Kapriaji, M. (2022). Desentralisasi dan Kapasitas Pemerintah dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia di Indonesia. In *JIAP* (Vol. 8, Issue 2).
- Rosenbloom, D. H. ., Kravchuck, Robert., & Clerkin, R. M. . (2015). *Public administration : understanding management, politics, and law in the public sector*. McGraw-Hill Education.
- Yolanda, N. (2022). Analisis pertumbuhan ekonomi daerah dan ketimpangan wilayah di Provinsi Riau., *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 20(1), 55–68.